



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Indra Bastian (2009:28) kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Kemudian Robert Prestus dalam Pandji Santosa (2009:34) mengatakan bahwa kebijakan, dalam pengertian yang paling fundamental adalah satu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan, membenarkan, memedomani, atau menggerakkan seperangkat tindakan, baik yang nyata ataupun yang tidak. Selanjutnya dalam membahas kebijakan, Theodore Lowi lebih menekankan pentingnya konsep paksaan. Ia memperlakukan kebijakan tidak lebih dari pada pemaksaan yang disengaja.

Kata kebijakan itu sendiri dapat ditafsirkan bermacam-macam. Sebagaimana diuraikan oleh para pakar berikut ini :

a. Menurut E. Hugh Heclo, kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa masalah.

b. Menurut Charles O.Jones adalah suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Terdiri dari tujuan, rencana, program, keputusan dan akibat.

c. Henz Eula dan Kenneth Previit merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai dengan kelakuan yang berkesinambungan dan

berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan itu. Ibnu Syafiie (2009:85)

Jadi, kebijakan dapat dibuat oleh suatu lembaga sedangkan pelaksanaannya tidak selalu persis dengan apa yang ditetapkan semula, disebut kebijaksanaan aparat birokrasi.

Dalam Pandji Santosa (2009:26) Thomas R.dye merumuskan kebijakan publik sebagai “pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”. Kemudian David easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”.

Menurut Riant Nugoroho (2009:142) kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemudian riant Nugroho (2009:150) juga menyebutkan bahwa kebijakan publik sebenarnya dapat disebut hukum dalam arti luas, jadi “sesuatu yang mengikat dan memaksa”.

Amir Santoso dalam Budi Winarno (2012:22) menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dan kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk kedalam kategori ini terbagi kedalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan mereka yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengganggu kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

2.2 Pengertian Perencanaan

Demi tercapainya tujuan organisasi sebagai mana yang telah ditetapkan sebelumnya, keberadaan dan kelangsungan organisasi sangat diperlukan dengan adanya seorang pemimpin yang merupakan penanggung jawab berhasil tidaknya suatu organisasi, sebab pemimpin organisasi dituntut untuk dapat menggerakkan, mengarahkan dan membina para bawahannya didalam bekerja agar memiliki tanggung jawab atas beban kerja, untuk itu jelasnya keberhasilan organisasi dan kemampuan pimpinan dalam menggerakkan anggota organisasi mutlak diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengemukakan bahwa beberapa teori yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis ungkapkan, yaitu terhadap pelaksanaan perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 24 Tahun 2004).

Salah satu maksud perencanaan adalah melihat bahwa program-program dan penemuan sekarang dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan diwaktu yang akan datang yaitu meningkatkan pembuatan keputusan yang baik. Kesalahan dalam pengambilan keputusan memang sering terjadi dalam organisasi manapun, untuk beberapa pengamatan ahli, hambatan dalam perumusan kebijakan perlu diketahui secara dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada juga yang mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu keputusan apa yang diharapkan dalam waktu yang akan datang (Soewarno Handayuningrat, 1990:125). Robinson Tarigan (2006:3) Mengatakan Perencanaan adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai factor noncontrollable yang relevan, memperkirakan factor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka menjapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai saran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. (Husaini Usman, 2011:65-66)

Menurut mahduh M. Hanafi (2004:2) perencanaan adalah suatu proses yang mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan yang ada di dalam organisasi.

Dari defenisi diatas yang dikemukakan oleh Mahduh M. Hanafi diartikan bahwa perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan selalu melekat dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Baik di sadari maupun tidak. Sebuah perencanaan akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan. Dengan melakukan perencanaan berarti kita bisa mengukur, mengendalikan dan dapat mengevaluasi setiap pekerjaan.

Menurut Manullang (2004:45), bahwa untuk membuat suatu rencana ada beberapa tingkat yang harus dilalui. Tingkat atau langkah-langkah tersebut adalah:

1. Menetapkan tugas dan tujuan.

Maksudnya tujuan yang harus ditetapkan terlebih dahulu agar dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dari serangkaian aktivitas dan tindakan yang akan dilaksanakan.

2. Mengobservasi dan menganalisis

Maksudnya adalah keadaan atau kondisi yang dimiliki oleh organisasi harus di analisa dengan tujuan untuk menemukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Hal ini sangat penting agar rencana yang disusun realistis dan objektif.

3. Membuat kemungkinan-kemungkinan

Maksudnya peluang yang mungkin diraih serta hambatan-hambatan yang muncul perlu diidentifikasi. Hal ini akan memberikan gambaran yang luas tentang kondisi eksternal organisasi agar rencana yang disusun dapat mengoptimalkan peluang dan bisa menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.

4. Menyusun rencana

Merupakan konsep tentang segala kegiatan yang dilaksanakan, hal ini agar organisasi mempunyai konsep aktivitas yang jelas serta kearah mana hasil yang dicapai dari sebuah aktivitasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu juga perencanaan merupakan proses untuk menentukan kemana harus melangkah dan mengidentifikasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dalam diri manusia atas segala tindakan selama di dunia ia akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Dalam setiap langkah, manusia harus memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus memiliki rencana kedepannya, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak terjerumus dalam kesesatan.

Defenisi pembangunan menurut (Siagian:2005) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi diatas dapat penulis artikan bahwa pembangunan merupakan arah untuk menuju modernitas. Modernitas disini maksudnya tentang bagaimana cara hidupnya yang baru dan lebih baik dari pada yang sebelumnya. Walaupun demikian, perlu di ingat bahwa konsep dari modernitas tidak hanya di identik dengan gaya hidup orang barat. Setiap bangsa dan negara harus mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai leluhur oleh bangsa yang bersangkutan.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan baik secara menyeluruh maupun berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara, (Haryono Sudiramunawar, 2002:15).

Mustopodijoyo mengatakan proses pembangunan ditentukan oleh sistem pemerintah yang dianut dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya:

1. Idiologi dan pandangan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.
2. Kebudayaan dan kebiasaan hidup didalam masyarakat bersangkutan.
3. Tingkat kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai bangsa tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat di pedesaan.

Disamping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma dalam kehidupan masyarakat di pedesaan.

Islam memparkan konsep pembangunan yang seimbang agar jangan melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:11-12:



Artinya: dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS. Al_Baqarah:11-12).

Dari penjelasan Firman Allah SWT diatas dapat penulis jabarkan bahwa akibat dari keingkaran, keserakahan dan mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelolah bumi ini, sehingga terjadilah bencana alam dan kerusakan di bumi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ulah tangan manusia yang mengancam kehidupan bumi seperti sering terjadi bencana alam dan lain sebagainya.

2.4 Perencanaan Pembangunan

Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu.(Tjokroamidjojo,1996).

Ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (Agen of Development)

Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996) di uraikan sebagai berikut:

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (Steady Social Economy growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produk nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan perkapita.
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya perluasan kesempatan kerja
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah.
6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasarkan kemampuan sendiri / Nasional.
8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Secara umum unsur-unsur pokok yang termasuk dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Sering pula disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana (*development objective/plan objective*).
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijakan yang konsisten dan serasi seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) adalah tahapan awal proses pembangunan. Dimana sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasara bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak maupun mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berguna pada atas prioritas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Ciri utama perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk tujuan yang bersifat perubahan kearah yang lebih baik dalam hal kesejahteraan

sosial ekonomi, keadilan dalam distribusi pendapatan, dan peningkatan kapasitas manusia.

2.5 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan, dan diakhiri pada musrenbang tingkat Provinsi. Seperti yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2009:34) Musrenbang yang harus dilalui dalam perencanaan dan penganggaran daerah adalah Musrenbang tingkat desa/kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang forum SKPD, Musrenbang tingkat kabupaten/kota, dan Musrenbang tingkat provinsi.

A. Musrenbang Kecamatan

Didalam lampiran Permendagri No 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

Kemudian, menurut Indra Bastian (2009:118) menjelaskan bahwa Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas kegiatan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Indra Bastian (2009) juga menjelaskan beberapa hal penting mengenai Musrenbang Kecamatan, antarlain yaitu:

1. Tujuan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

- a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan februari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

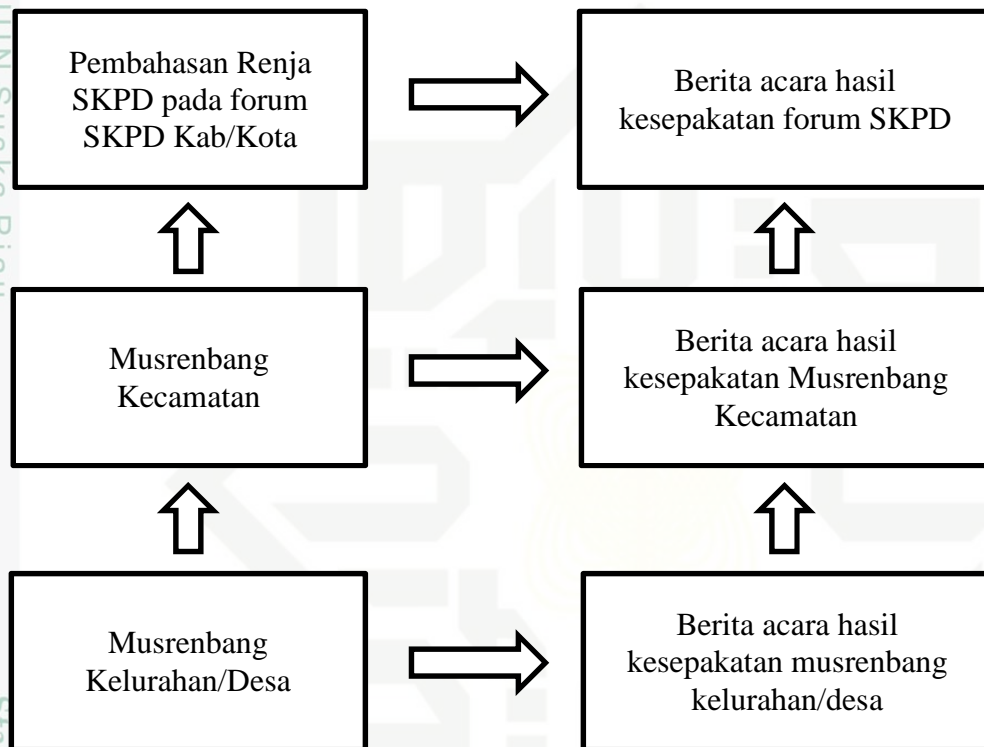
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara ringkas bagan alur kegiatan Musrenbang di Kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Alur kegiatan Musrenbang di Kecamatan



Sumber: Lampiran dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010

2. Masukan Musrenbang Kecamatan

Berbagai hal perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah:

a. Dari Desa/Kelurahan

- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masingmasing desa/kelurahan yang setidaknya berisi prioritas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan.

2. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan
 3. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosial warga, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan atau organisasi tani/nelayan tingkat kecamatan
- b. Dari Kabupaten/Kota:
1. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut.
 2. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut.
 3. Penjelasan nama dan jumlah forum SKPD dan forum gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.

3. Mekanisme Musrenbang Kecamatan

Didalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 ada dimuat lampiran yang menjelaskan mengenai tahapan proses pelaksanaan musrenbang kecamatan, yaitu sebagai berikut:

A. Persiapan Musrenbang Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembentukan Tim, Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim Penyelenggara musrenbang kecamatan antara lain: a. Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan, b. Kompilasi Hasil Musrenbang Desa
4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
5. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda kabupaten/kota.
6. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.
7. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD Kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta
2. Acara pembukaan musrenbang
3. Sidang Pleno I : Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang:
4. Sidang Kelompok
5. Sidang Pleno II, Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:
 - a) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
 - b) Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di kecamatan.
6. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibaca kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada Bupati/walikota sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten/kota, dan kepada Kepala SKPD Kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas di forum SKPD.

4. Keluaran Musrenbang Kecamatan

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

- a. Daftar prioritas pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang siap dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota yang didanai melalui APBD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- b. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- c. Berita acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan

a. Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

b. Narasumber

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bappeda, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan SKPD kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi

6. Tugas Tim Penyelenggara

a. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan.

b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.

c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kecamatan.

d. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan.

e. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- g. Merangkum berita hasil acara Musrebang Kecamatan yang sekurangkurangnya memuat: 1) prioritas kegiatan yang disepakati dan, 2) daftar nama delegasi yang terpilih.
- h. Menyampaikan berita acara kepada anggota DPRD dari wilayah kecamatan yang bersangkutan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia anggaran DPRD.
- i. Tugas Tim Delegasi
 1. Membantu Tim Penyelenggara dalam menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
 2. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
 3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.
 4. Mendiskusikan berita acara hasil musrenbang dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Setelah memperoleh kepastian mengenai bagaimana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan oleh masing-masing SKPD, maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Kemudian Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka aspek-aspek yang dijadikan penilaian dan evaluasi dalam persiapan dan pelaksanaan musrenbang antarlain yaitu:

a. Persiapan Musrenbang

Persiapan yang dilakukan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan musrenbang dan hasil-hasilnya. Adapun aspek-aspek yang perlu dipantau dan dievaluasi pada tahap persiapan musrenbang diantaranya :

1. Keberadaan, kompetensi, dan kualifikasi TIM Penyelenggara Musrenbang.
2. Proses musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya
3. Ketersediaan informasi bagi peserta
4. Media untuk menyampaikan undangan dan informasi adanya Musrenbang
5. Ketersediaan jadwal agenda musrenbang dan daftar peserta

b. Pelaksanaan Musrenbang

Di dalam pelaksanaan musrenbang, aspek-aspek yang perlu dipantau dan dievaluasi mencakup:

1. Tempat dan fasilitas pertemuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Informasi yang disediakan bagi peserta
3. Agenda pembahasan
4. Ketersediaan alat/tool, instrument, atau format untuk menyampaikan, merumuskan masalah, kebutuhan, dan aspirasi
5. Keterwakilan stakeholders
6. Kehadiran dan keterlibatan DPRD
7. Ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi fasilitator
8. Alur dan dinamika pembahasan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Rifal Rinaldi (2014) “ Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir Tahun 2013. Permasalahan yang diangkatnya adalah dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tempuling tidak ada acara penentuan prioritas secara bersama sama atau kelompok dalam forum tersebut, ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan kabupaten merupakan rumusan pihak kecamatan berdasarkan daftar usulan dari masing masing kelurahan/desa dan dinas/instansi. Selain itu, musrenbang tersebut hanya dihadiri oleh pihak pihak dari dinas/instansi pemerintah, tidak ada satupun perwakilan dari pihak pihak yang lainnya.

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tempuling Tahun 2013 belum terlaksana dengan baik, dari hasil wawancara kepada informan penelitian dan hasil tanggapan responden masih banyak aspek-aspek yang masih belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan musrenbang tersebut. Kemudian masih kurang

memadainya fasilitas dan tempat pelaksanaan Musrenbang, dan juga sumber daya manusia yang masih kurang baik dari pihak kecamatan maupun dari pihak masyarakat sehingga pelaksanaan musrenbang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belum bisa dilakukan secara optimal.

Penelitian La Ode Pausa (2011) Tentang “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi Tahun 2008”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya beberapa indikasi yang kurang sesuai dengan harapan. Upaya pemerintah daerah telah memberikan peluang partisipasi masyarakat untuk mengusulkan rencana pembangunan, namun pada kenyataannya hanya sebatas pengusulan. Sehingga banyak usulan yang tidak ditindak lanjuti dengan menyetujui program yang diusulkan dari bawah melalui SKPD. Selanjutnya dalam setiap Musrenbang di tingkat kecamatan, baik Bappeda maupun SKPD dan lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi mendapat sorotan dari masyarakat yang berpandangan bahwa forum mekanisme perencanaan melalui Musrenbang yang diadakan setiap tahun tidak bermanfaat karena usulan-usulan prioritas pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui forum Musrenbang dengan harapan akan terealisasi dalam Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) tahun yang akan datang ternyata sebagian besar tidak terealisasi.

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain: dimensi kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan belum dapat dilakukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik seperti kurangnya data yang akurat. Pada dimensi partisipasi masyarakat juga masih belum efektif, dimana masyarakat masih kurang perhatian dalam mengikuti musrenbang. Demikian halnya dalam waktu pelaksanaan belum tepat waktu, selalu mengalami keterlambatan.

Erwin Syahputra Nasution (2010) Tentang “Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan Area Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari kelima indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, hasil yang diperoleh dan hambatan-hambatan, menunjukkan skor rata-rata dalam kategori baik. Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa satu indikator yaitu sumber-sumber yang termasuk kategori sedang, keempat indikator lainnya termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area dapat dilaksanakan cukup efektif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti mencoba meneliti tentang pelaksanaan musrenbang kecamatan di kecamatan salo kabupaten Kampar. Dimana permasalahannya adalah kurangnya tingkat partisipasi dari pemangku kepentingan (Stake holder) pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Salo ini, sehingga usulan-usulan dari masyarakat sering tidak terealisasi. Kemudian keterbatasan pengetahuan teknis para pihak pengambilan keputusan dalam menentukan daftar skala prioritas pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Pandangan Islam

[illegible]

Pada ayat ini Allah memuji akhlak nabi Muhammad SAW. Yang tinggi dalam memimpin masyarakat Islam. Meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin

Disamping itu Rasulullah selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah itu karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Rasulullah. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi.

[illegible]

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa sesuai petunjuk Al-Qur'an, Rasulullah SAW mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. Beliau sendiri meski seorang Rasul amat gemar berkonsultasi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan. Tetapi dalam berkonsultasi Rasulullah SAW tidak hanya mengikuti satu pola saja. Kerap kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang ahli dalam hal dipersoalkan atau propesional. Terkadang beliau melempar masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat.

Disamping itu dapat dipahami pula bahwa orang-orang yang memiliki komitmen dalam ketaatan mematuhi seruan Allah, yaitu selalu menegakkan sholat, selalu menyelesaikan segala urusan keduniaan dengan musyawarah, menegakkan prinsip-prinsip musayawarah, memanfaatkan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah selalu dinafkahkan (dikeluarkan) untuk jalan Allah SWT, maka balasannya di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu berupa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang abadi di dalam surga, termasuk juga orang-orang yang taat kepada tuhan mereka.

2.8 Definisi Konsep

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep.

- a. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
- b. Kebijakan Publik adalah pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.
- e. Perencanaan Pembangunan adalah suatu kegiatan perencanaan yang berkenaan dengan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.
- f. Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai saran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator- indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Tabel 2.1 Indikator-indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),	a. Persiapan Musrenbang	1. Kompetensi Penyelenggara Musrenbang 2. Proses Musyawarah Sebelumnya 3. Informasi untuk peserta 4. Media informasi 5. Ketersediaan jadwal agenda musrenbang dan daftar peserta
	b. Pelaksanaan Musrenbang	1. Tempat dan fasilitas pertemuan 2. Informasi untuk peserta 3. Agenda pembahasan 4. Ketersediaan instrument 5. Keterwakilan stakeholders 6. Keterlibatan DPRD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

